

terhadap DPR hanya 44,4% dari 100% total responden. Terpaut jauh di bawah persepsi lembaga negara lainnya. Sebanyak 78,7% orang yang menjawab mengatakan, lembaga legislatif ini belum mengutamakan kepentingan dan aspirasi publik. Survei Charta Politika (2022) menyebut DPR menjadi satu dari dua lembaga negara yang paling kurang dipercaya publik dibandingkan lembaga lainnya dengan persentase 32,6%.

Menjadi sebuah pertanyaan besar terlebih bagi para akademisi ilmu komunikasi, aspek yang menjadi akar masalah citra DPR RI yang kurang positif. Karena pada hakikatnya fungsi DPR seharusnya memiliki citra positif sebagai kekuatan penyeimbang sebuah pemerintahan. Terlebih umum diketahui, DPR adalah rumah berbagai kepentingan. Kepentingan rakyat, kepentingan kelompok politik, kepentingan individual, maupun kepentingan lainnya. Tantangan yang tidak mudah namun perlu disikapi secara matang dan strategis.

Dalam sebuah lembaga, peran manajemen citra umumnya terletak pada unit kerja Humas. Dalam tubuh DPR RI, terdapat dua biro yang bersinggungan dengan citra lembaga terhadap publik. Yaitu Biro Humas DPR RI dan Biro

Pemberitaan Parlemen. Namun dalam konteks manajemen citra DPR terhadap berita-berita negatif yang dapat bergerak dalam jangka pendek terletak bukan pada Humas DPR RI, melainkan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI (Pahlevi, 2023).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan narasumber terkait dan data sekunder melalui literatur-literatur yang tersedia. Kemudian dilakukan analisis dengan teknik analisa deskriptif.

Bonham menyampaikan definisi public relations sebagai suatu seni menciptakan pengertian publik secara lebih baik, sehingga akan memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu organisasi, badan, atau seseorang. Seorang aktor PR harus mampu memiliki seni dalam mengelola strategi komunikasinya kepada publik demi image positif lembaganya (Yulianita, 2007 : 27).

Haedrich (1993 : 83-93) menyoroti pentingnya penelitian manajemen citra untuk public relations. Studi ini menyerukan peningkatan peran dari public relations dalam hal

hari ini lebih kepada edukasi tentang keparlemenan kepada masyarakat berbagai kalangan (Royandiah, 2022).

Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI memiliki tugas yang berbeda dengan Biro Humas DPR RI. Dasar hukum nomenklatur Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI adalah Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Setjen DPR RI No. 4 Tahun 2021. Tepatnya pada BAB II, Bagian Ketiga "Deputi Bidang Persidangan", Pasal 9 ayat e (2021:32). Adapun berdasarkan Paragraf 5 tentang Biro Pemberitaan Parlemen Pasal 150, tugas dari biro ini adalah menyelenggarakan dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan (2021:53).

Secara lebih rinci fungsi Biro Pemberitaan Parlemen adalah:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan di media cetak dan media sosial, televisi, dan

radio parlemen, dan penerbitan

3. Penyelenggaraan televisi dan radio (TVR Parlemen)
4. Penyelenggaraan urusan penerbitan
5. Penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen, dan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan (pasal 151, hal. 64-65)

Tahapan dan Langkah Taktis Biro Parlemen dalam Manajemen Berita Negatif DPR RI

Hal pertama yang perlu diketahui sebelum tahapan dan langkah adalah komponen bagian yang terdapat dalam Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI. Berdasarkan Peraturan Setjen DPR RI pasal 155 (2021:65), Media Biro Pemberitaan Parlemen terdiri atas bagian Media Cetak dan Media Sosial, bagian Televisi dan Radio Parlemen (TVR), dan bagian Penerbitan.

Dalam mengimplementasikan tugasnya, pada bagian media cetak dan media sosial, Biro Pemberitaan Parlemen membuat perencanaan jangka sedang dan pendek seperti agenda setting dan framing serta pembuatan konten berita

developer Meikarta. Biro Pemberitaan Parlemen dengan sigap dan terukur menaikkan berita ini dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat aspirasi dan keluhannya didengar dan segera direspon konkret oleh anggota DPR RI. Juga mengenai suksesnya DPR menekan biaya haji tahun 2023 sehingga peningkatan tidak sebesar yang diajukan oleh eksekutif terkait. Disahkannya UU TPKS turut menjadi pencapaian yang mengundang respon positif kalangan perempuan Indonesia.

Di samping itu maraknya berita negatif bahkan hoax membuat Biro Pemberitaan Parlemen berada pada posisi penting dalam melakukan respon yang tepat sasaran dan cepat dalam rangka manajemen citra lembaga. Langkah Biro Pemberitaan Parlemen dalam menghadapi berita negatif atau hoax adalah dengan melakukan reporting kepada Setjen DPR RI maupun Pimpinan DPR terkait, kemudian meminta pimpinan ataupun anggota DPR RI untuk memberikan klarifikasi maupun pendapat yang kemudian akan dibuatkan press release oleh Biro Pemberitaan Parlemen. Hal ini disebabkan Biro Pemberitaan Parlemen sama seperti Humas DPR RI yaitu tidak memiliki kewenangan dalam menyampaikan

pendapatnya mewakili lembaga DPR RI. Dalam hukumnya, anggota DPR RI yang memegang fungsi speaker.

Citra Negatif DPR : Antara Paradoks dan Kesempatan Perbaikan Kinerja

Pahlevi (2023) menyebutkan bahwa dalam upayanya mencari akar permasalahan tingginya persepsi negatif terhadap DPR RI, Biro Pemberitaan Parlemen telah melakukan survey khusus di kalangan milenial dan Gen-Z sebagai mayoritas pemilih DPR di 2024 nanti terkait pengetahuan mereka tentang DPR, nama-nama anggota, Alat Kelengkapan DPR (AKD), tugas dan fungsi, sampai pada tingkat kepercayaan dan sumber informasi mereka selama ini terkait DPR. Dari hasil survey kinerja DPR dari skala 1-10, hasilnya pada angka 5 koma. Menurut Pahlevi ini belum cukup bagus, tetapi tidak cukup buruk.

Namun ada paradoks yang muncul. Ketika ada pertanyaan basic knowledge tentang tupoksi DPR, banyak dari mereka yang tidak tahu. Milenial menjawab benar di angka 35,6 poin, yang tidak mengetahui 64,4 poin. Sementara Gen-Z yang menjawab benar hanya 25,7 poin yang tidak mengetahui 74,3 poin. Artinya sumber informasi mereka adalah berita-berita di media. Dan hal ini menjadi temuan penting untuk mengatur

melalui media sosial dapat merusak citra DPR RI. Perubahan kebijakan media atau algoritma platform media sosial juga dapat mempengaruhi visibilitas berita yang disebarkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen. Tingginya tingkat ketidakpercayaan publik terhadap DPR RI secara keseluruhan juga menjadi hambatan utama dalam membangun citra positif.

Dalam menghadapi berbagai ancaman ini, Biro Pemberitaan Parlemen perlu menjalankan peranannya dengan cermat. Respon yang tepat sasaran dan cepat terhadap berita negatif, bahkan hoax, menjadi kunci dalam manajemen citra lembaga. Dalam konteks ini, fokus bukan hanya pada pengiriman berita positif tetapi juga pada aspek pengiriman yang harus dipastikan agar pesan tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat.

Oleh karena itu, dengan memahami secara menyeluruh analisis SWOT ini, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI dapat mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Dengan pendekatan yang cermat dan adaptabilitas terhadap perubahan, Biro

ini dapat terus berperan sebagai agen penting dalam membentuk opini publik terhadap DPR RI (Pahlevi, 2023).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Carpenter dan Krause (2012) yang pada intinya menekankan bahwa audiens atau publik tidak mengobservasi realitas organisasi seutuhnya, namun hanya citra parsial dari sebuah efektivitas organisasi. Konsepsi ini sebaiknya menjadi kunci pemahaman tim Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI. Secara alamiah konsepsi ini justru diperkuat dengan temuan survey Biro Pemberitaan Parlemen mengenai rendahnya pemahaman tupoksi DPR di kalangan milenial dan Gen-Z. Artinya angka kepercayaan mereka terhadap DPR masih terbilang rendah disebabkan oleh informasi yang didapat langsung dari media-media yang ada, bukan dari aktor cover both side DPR RI, yakni Biro Pemberitaan Parlemen.

Meningkatkan optimalisasi berita positif DPR adalah langkah yang sudah tepat dan perlu terus ditingkatkan secara inovatif dan kreatif. Bagaimana berita positif dari Biro Parlemen tidak hanya bertumpu pada delivery namun juga harus dipastikan delivered. Langkah berkolaborasi dengan TV, Radio, serta media alternatif kekinian seperti Spotify

